

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, adil dan transparan saat ini dirasakan semakin meningkat. Tuntutan tersebut menjadi hal serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena merupakan tanggungjawab pemerintah kepada rakyatnya. Permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan negara berkaitan erat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), maka diperlukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara secara ekonomis, efektif dan efisien. Di Indonesia pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan daerah dilakukan oleh auditor pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan suatu institusi yang dipercaya dapat mewujudkan tata kelola keuangan negara dan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel (*good governance*).

Menurut Mardiasmo (2006) ada tiga faktor utama yang dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, seperti masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengendalian atau *control* adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sebagai salah satu unit yang melakukan pengawasan dalam pemerintahan dengan upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan kegiatan pengawasannya seperti audit, asistensi, sosialisasi, konsultasi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pejabat Fungsional Auditor memiliki peranan dan fungsi penting dalam hal pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Auditor dituntut untuk

memiliki keahlian dalam menjalankan tugasnya. Laporan yang dihasilkan oleh auditor akan dapat mencerminkan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor yang merupakan identitas dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai auditor internal Indonesia.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pemerintah yang akuntabilitas telah dilakukan sesuai yang diharapkan. Pengawasan yang dilaksanakan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah harus didukung oleh kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan.

Pada saat ini semakin banyak terjadinya tindakan *fraud*, dengan semakin canggihnya teknologi maka berbagai macam pula cara-cara yang dilakukan oleh para koruptor dalam mencari celah dalam suatu sistem. Maka dari itu kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* harus ditingkatkan sebanding dengan perkembangan teknologi (Haikal, 2017). Teknologi yang ada memberikan peluang bagi koruptor untuk melakukan berbagai bentuk kecurangan. Lemahnya pengawasan dan pemeriksaan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintah yang akan berdampak pada penyalahgunaan keuangan negara. Hal ini menjadi tantangan bagi auditor pemerintah untuk melakukan tugas pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara lebih baik lagi.

Audit merupakan salah satu bentuk dari pengawasan yang dilakukan dengan cara mencari keterangan yang sebenarnya tentang kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang diperiksa, membandingkan hasil yang diperoleh dengan kriteria yang telah ditetapkan dan memberikan pendapat serta memberikan rekomendasi mengenai tindakan-tindakan perbaikan yang dapat dilakukan (Sukriah, dkk. 2009:2).

De Angelo (1981) dalam Sumartono dkk (2019) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi *auditee*. Agrah (2017:16) mendefinisikan kualitas audit internal pemerintah adalah audit yang dilaksanakan dengan mengacu pada standar audit intern pemerintah yang menghasilkan laporan hasil audit yang dapat mengungkap kelemahan pengendalian intern, kecurangan dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam organisasi serta dapat memenuhi harapan dari para *stakeholder*.

Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah skeptisme profesional seorang auditor. Dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2011), skeptisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Sikap kritis terhadap bukti – bukti tersebut akan menghasilkan bukti yang dapat meyakinkan auditor dalam memberikan opini.

Penelitian sebelumnya oleh Ni Luh dan Luh (2017) yang meneliti pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas audit mengungkapkan bahwa skeptisme profesional sangatlah penting dimiliki oleh seorang auditor untuk mendapatkan informasi yang kuat yang kemudian dijadikan sebagai dasar bukti audit yang relevan yang dapat mendukung pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian tersebut, Fitria dan Nadirsyah (2017) menyebutkan bahwa sikap skeptis dapat menumbuhkan tingkat kewaspadaan auditor dalam mengevaluasi bukti audit yang diberikan oleh manajemen, auditor yang memiliki sikap skeptis cenderung lebih waspada, berhati – hati dan memiliki pikiran yang selalu mempertanyakan, dengan demikian hal ini dapat mendukung terjaminnya kualitas audit yang dihasilkan.

Dalam mendeteksi adanya tindak kecurangan faktor pengalaman memiliki peranan yang penting bagi seorang auditor, pengalaman yang lebih tentunya akan menambah pengetahuan seorang auditor (Noviani, 2002). Sejalan dengan pendapat tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Ismiyati (2012) menyebutkan bahwa pengalaman kerja seseorang akan meningkatkan keterampilan dan menambah pengetahuan seseorang dalam bekerja. Semakin sering seorang melakukan pekerjaan yang sama, maka pengalaman kerja tersebut akan semakin terbentuk dan penyelesaian pekerjaannya akan semakin cepat. Seorang auditor yang memiliki pengalaman yang banyak akan dapat lebih mudah dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan serta mencari penyebab dan solusinya.

Pendapat lain yang sama dikemukakan oleh Bawono dan Singgih (2010) bahwa jika seseorang melakukan pekerjaan yang sama secara terus menerus, maka akan menjadi lebih cepat dan lebih baik dalam menyelesaikannya. Hal ini disebabkan oleh karena dia telah benar-benar memahami teknik atau cara menyelesaikannya, serta telah banyak menghadapi berbagai kesulitan atau kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan tersebut, sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut seseorang akan lebih cermat dan berhati-hati.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menarik bagi penulis untuk meneliti kembali tentang faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Dari penelitian – penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan pada Kantor Akuntan Publik dan Perwakilan Inpektorat, sedangkan penelitian ini dilakukan pada BPKP Perwakilan Sumatera Barat. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian ini terdapat pada penentuan variabel – variabel yang berpengaruh terhadap kualitas audit serta waktu dan lokasi penelitian, maka penulis akan meneliti ***Pengaruh Skeptisme Profesional dan Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit.***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa yang menjadi pokok perhatian masalah dalam melakukan penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit Perwakilan BPKP Sumatera Barat ?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit Perwakilan BPKP Sumatera Barat ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas audit Perwakilan BPKP Sumatera Barat.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit Perwakilan BPKP Sumatera Barat.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta memberikan masukan khususnya tentang audit yang berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis sebagai dasar perluasan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana pengaruh skeptisme profesional dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit sektor publik di Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Barat.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan tugas pengawasan Perwakilan BPKP Sumatera Barat, sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik salah satunya dalam hal pengambilan keputusan.

## 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk meneliti pengaruh skeptisme profesional dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit internal pada Perwakilan BPKP Sumatera Barat.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.



## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini terdapat kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang menjadi acuan dalam penelitian ini yang berguna sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diuji.

## **BAB III : Metodologi Penelitian**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis.

## **BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data dan pembahasan tentang permasalahan dalam penelitian ini.

## **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya.